LPEM FEB UI
UNIVERSITAS INDONESIA

LABOR MARKET BRIEF

Volume 3, Nomor 12, Desember 2022

ISSN 2808-2060

KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Muhammad Hanri
hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah
nia.kurnia@lpem-feui.org

Muhammad Amin Rizky
aminrizky@lpem-feui.org

DAFTAR ISI

Pengukuran Ketimpangan Gender – 1

Gender Inequality Index: Perspektif Kewilayahan – 2

Melihat Lebih Dalam Indeks Ketimpangan Gender Indonesia – 3

Kondisi Ketimpangan Gender pada Indikator Sosial Ekonomi Lainnya – 5

RINGKASAN

Dalam beberapa aspek sosial dan ekonomi, pengukuran terhadap ketimpangan antara wanita dan pria dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik antar waktu dilihat dari Indeks Ketimpangan Gender. Meskipun demikian, pada beberapa indikator lain, masih terdapat beberapa perbaikan yang dapat dilakukan. Jaminan kesehatan nasional menjadi program dengan selisih antara wanita dan pria yang rendah. Sedangkan parameter lainnya seperti literasi internet dan finansial memiliki selisih yang tinggi. Selain itu, korban kekerasan seksual yang didominasi oleh wanita di berbagai daerah di Indonesia patut menjadi perhatian yang serius.

Pengukuran Ketimpangan Gender

Pemberdayaan wanita dan upaya mendorong kesetaraan gender menjadi hal yang penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini salah satunya tertuang dalam Pilar ke-5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, pengukuran terhadap kondisi ketimpangan gender menjadi hal yang krusial untuk dilakukan dalam rangka menelusuri sejauh mana pencapaian kesetaraan gender menunjukkan hasilnya. Selain itu, pengukuran tersebut juga dapat memberikan gambaran tentang capaian program pengarusutamaan gender yang dilaksanakan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengadopsi perhitungan *Gender Inequality Index* (GII) dari UNDP sejak tahun 2017. GII diperkenalkan oleh UNDP sejak tahun 2010 di mana indeks dihitung sebagai metrik komposit dari tiga dimensi utama yaitu kesehatan (reproduksi), pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Masing-masing dimensi tersebut disusun atas 2 indikator (kecuali pasar tenaga kerja). Indikator kemudian dihitung untuk pria dan wanita (kecuali indikator kesehatan). Setelah menghasilkan indeks secara total dari tiga dimensi tersebut, maka akan diperoleh angka dari 0-1, dengan interpretasi semakin tinggi angka indeks, maka menunjukkan semakin timpang capaian keberhasilan pembangunan antara pria dan wanita. Adapun penyesuaian yang dilakukan oleh BPS untuk GII terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Indeks Ketimpangan Gender

Dimensi	Indikator	
	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka kematian ibu melahirkan	Proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam dua

No. ISSN 2808-2060

Dimensi	Indikator	
	UNDP	BPS
		tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan
	Tingkat fertilitas remaja	Proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia < 20 tahun
Pemberdayaan	Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMP	Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA
	Persentase penduduk yang duduk di parlemen	Persentase penduduk yang duduk di parlemen
Pasar tenaga kerja	Persentase penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja	Persentase penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

Gender Inequality Index: Perspektif Kewilayahan

Di tingkat global, GII menunjukkan tren menurun yang artinya ketimpangan gender semakin membaik dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. GII global tercatat sebesar 0,57 pada tahun 2020 dan menjadi 0,465 pada tahun 2021. Meskipun demikian, masih ada disparitas GII tahun 2021 antarwilayah di dunia. Terdapat kawasan dengan GII di bawah indeks global seperti Asia Timur dan Pasifik (0,337), Eropa dan Asia Tengah (0,227), serta Amerika Latin dan Kepulauan Karibia (0,381). Sementara itu, kawasan lain memiliki indeks lebih tinggi dibandingkan dengan indeks global, yaitu Arab (0,536), Asia Selatan (0,508), dan Sub-Sahara Afrika (0,569).

Indonesia sendiri juga menunjukkan tren GII yang baik antar waktu terutama dalam 10 tahun terakhir. GII Indonesia tercatat sebesar 0,499 pada tahun 2010 dan terus menurun sampai dengan 0,444 pada tahun 2021, meskipun sempat naik pada tahun 2019 (0,457). Saat ini, GII Indonesia berada di bawah indeks global, sehingga dari 170 negara, Indonesia berada di peringkat ke-110. Akan tetapi, di kawasan Asia Tenggara, indeks Indonesia masih menduduki peringkat ke-7 di mana Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura (0,04) dan Malaysia (0,228). Indonesia juga masih berada di bawah Brunei Darussalam (0,259), Vietnam (0,296), Thailand (0,333), serta Filipina (0,419). Hanya tiga negara lain yang berada di bawah peringkat Indonesia yaitu Kamboja (0,461), Laos (0,478), dan Myanmar (0,498).

Capaian dari negara-negara di Asia Tenggara tersebut dipengaruhi oleh keunggulan masing-masing di indikator yang berbeda. Secara keseluruhan, Singapura merupakan negara dengan capaian yang paling baik di semua indikator GII. Malaysia dan Brunei Darussalam memiliki keunggulan di indikator kesehatan reproduksi, tetapi proporsi wanita dalam parlemen yang cukup rendah. Sedangkan Vietnam dan Thailand, memiliki angka kematian maternal yang membuat indeks kesehatan mereka cukup baik, meskipun masih banyak penduduk wanita yang berpendidikan rendah.

No. ISSN 2808-2060

Gambar 1. IKG Level Provinsi, 2021
Sumber: BPS, 2022, diolah

Disparitas ketimpangan gender yang dilihat berdasarkan IKG dari BPS juga terjadi di level provinsi di Indonesia. Pada tahun 2021, tercatat bahwa di luar Pulau Jawa cenderung memiliki indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Sulawesi Tenggara (0,506), Jambi, (0,496) Nusa Tenggara Barat (0,49), Maluku Utara (0,485), serta Kalimantan Barat (0,483) menduduki lima provinsi dengan indeks tertinggi. Sedangkan provinsi dengan indeks terendah atau ketimpangan gender yang cukup rendah adalah Provinsi Bali (0,076), DKI Jakarta (0,151), DI Yogyakarta (0,166), Jawa Tengah (0,269), dan Kepulauan Riau (0,308). Meskipun demikian, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan IKG dalam kurun waktu 2019-2021.

Melihat Lebih Dalam Indeks Ketimpangan Gender Indonesia

Dimensi kesehatan (reproduksi) wanita di Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Di level nasional, proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan pada tahun 2021 tercatat cukup baik, yaitu sebesar 0,111%. Akan tetapi, di level provinsi, masih ada lebih dari 50% provinsi dengan proporsi lebih besar daripada rata-rata nasional tersebut. Untuk proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia < 20 tahun, masih ada lebih dari 60% provinsi dengan proporsi lebih dari rata-rata nasional (0,262%). Mayoritas dari provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi di luar Jawa, terutama di bagian Indonesia timur.

Di sisi lain, untuk dimensi pemberdayaan, persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA secara nasional tidak memiliki selisih yang jauh antara pria (42,38%) dan wanita (36,9%). Meskipun demikian, di level provinsi, terdapat dua belas provinsi dengan selisih lebih dari rata-rata nasional, di

No. ISSN 2808-2060

antaranya adalah Bali (10,26 persen poin), Papua Barat (10,04 persen poin), dan NTB (9,16 persen poin). Pada indikator ini, terdapat provinsi-provinsi di Jawa yang juga masih memiliki selisih cukup tinggi, yaitu Banten (9 persen poin) dan DKI Jakarta (8,95 persen poin).

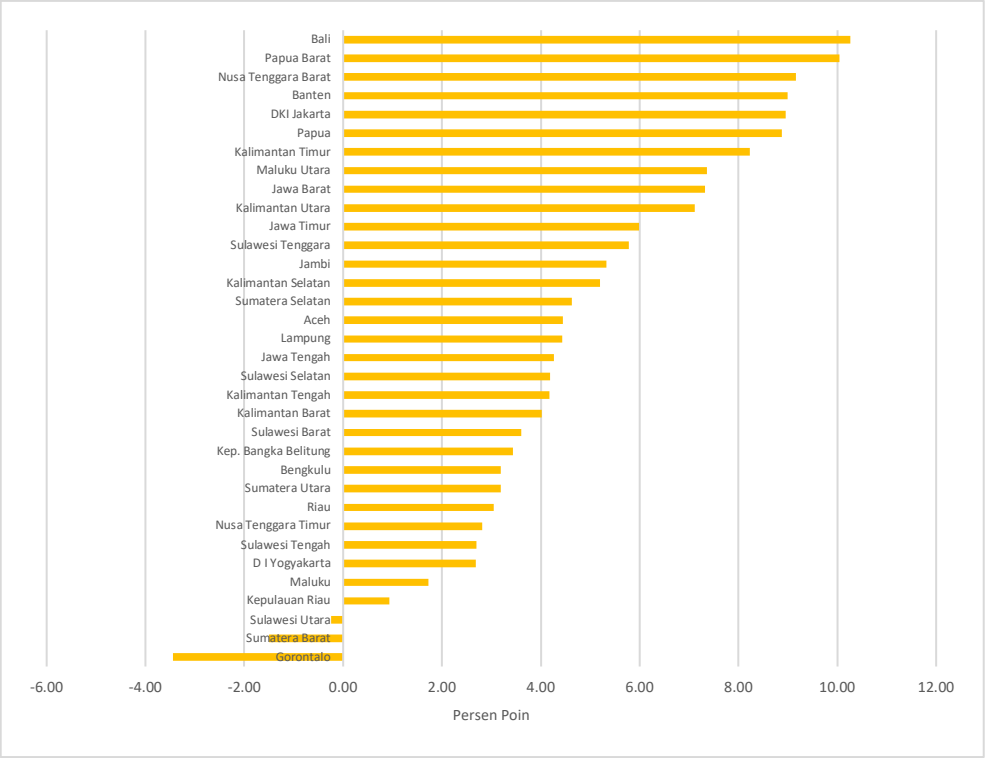

Gambar 2. Selisih Persentase Pria dan Wanita Usia 25 Tahun ke Atas yang Berijazah Terakhir Minimal SMA, 2021
Sumber: BPS, 2022, diolah

Masih terkait dengan dimensi pemberdayaan di tingkat nasional, persentase wanita yang duduk di parlemen masih di bawah 30% yaitu hanya 21,89%, cukup jauh jika dibandingkan dengan keterwakilan pria (78,11%). Hanya Provinsi Kalimantan Tengah (33,3%) dan Sulawesi Utara (29.5%) yang memiliki keterwakilan wanita di parlemen cukup baik. Hampir 80% provinsi di Indonesia masih memiliki selisih 50 persen poin keterwakilan pria dan wanita. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat keterwakilan wanita dalam parlemen mengingat keterwakilan ini akan meningkatkan peluang wanita agar setara dengan pria dalam turut serta memengaruhi proses politik dengan perspektif wanita.

No. ISSN 2808-2060

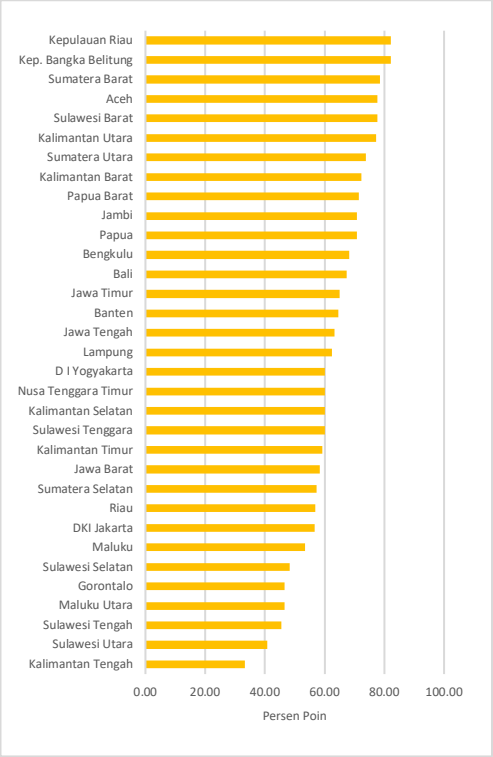

Gambar 3. Selisih Persentase Pria dan Wanita yang Duduk di Parlemen, 2021
Sumber: BPS, 2022, diolah

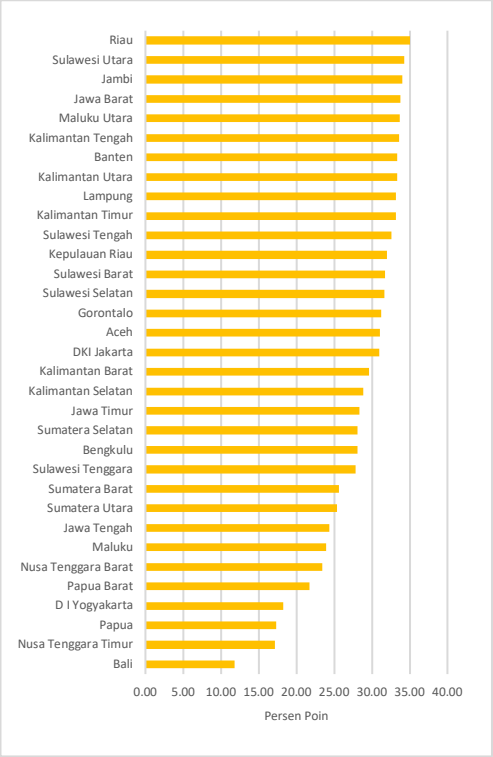

Gambar 4. Selisih TPAK Pria dan Wanita, 2021
Sumber: BPS, 2022, diolah

Sementara itu, dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pada tahun 2021 tercatat bahwa TPAK wanita (53,34%) masih lebih rendah dibandingkan dengan TPAK pria (82,27%). Selisih antara TPAK wanita dan pria paling tinggi tercatat di Provinsi Kep. Bangka Belitung (36,8 persen poin), Riau (35 persen poin) dan Sulawesi Utara (34,2 persen poin). Sedangkan selisih paling kecil terlihat di Provinsi Papua (17,3 persen poin), Nusa Tenggara Timur (17,9 persen poin), dan Bali (11,8 persen poin).

Kondisi Ketimpangan Gender pada Indikator Sosial Ekonomi Lainnya

Pada Desember 2021, tercatat bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia adalah sebanyak 235,72 juta orang atau sebesar 87% dari total penduduk. Angka ini meningkat sebesar 13,26 juta orang jika dibandingkan dengan kondisi pada Desember 2022. Persebaran JKN dan parameter lainnya relatif proporsional mengikuti besarnya populasi pada suatu daerah.

Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan daerah dengan penduduk terbesar di Indonesia. Sejalan dengan kepesertaan JKN, provinsi dengan kepesertaan terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Di satu sisi, kepesertaan terendah berada pada provinsi dengan jumlah penduduk yang kecil,

No. ISSN 2808-2060

yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Utara. Hal ini dapat terjadi karena BPJS Kesehatan menjamin semua masyarakat mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, khususnya karena adanya program Bantuan Penerima Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang menyasar masyarakat kurang mampu.

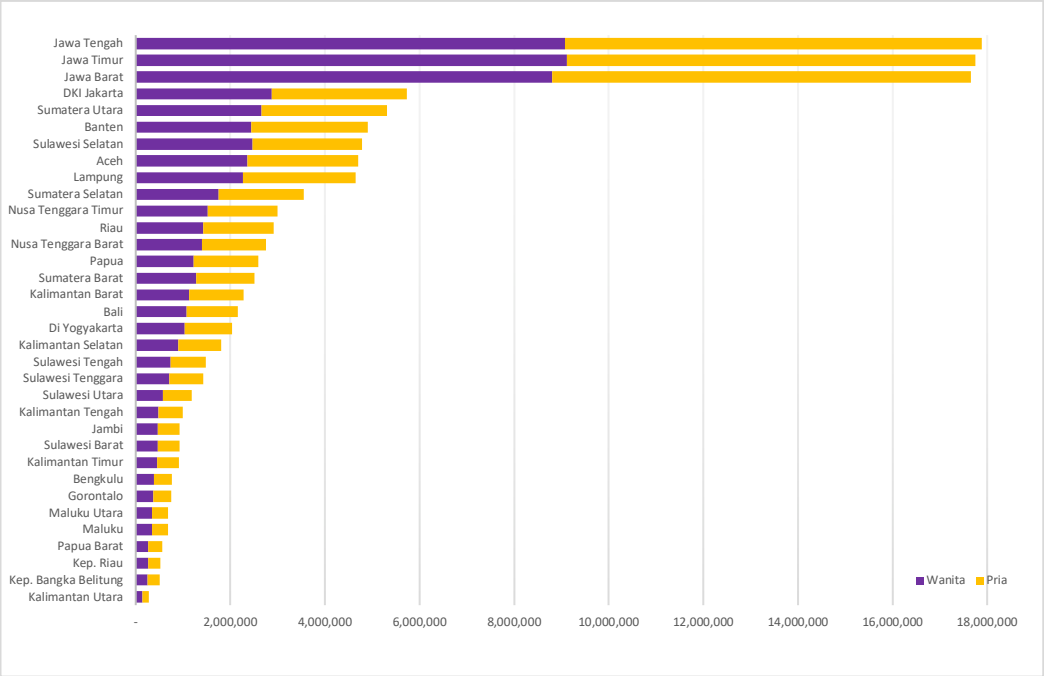

Gambar 5. Peserta Jaminan Kesehatan PBI
Sumber: Susenas, 2021, diolah

Kepesertaan JKN PBI secara rata-rata nasional pada periode ini sedikit didominasi oleh pria yaitu sebesar 50,3% sedangkan wanita sebesar 49,7%. Daerah dengan proporsi kepesertaan wanita sama dengan dan di atas rata-rata nasional sebanyak 22 provinsi, sedangkan 12 provinsi lainnya masih di bawah rata-rata nasional. Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan proporsi kepesertaan wanita tertinggi yaitu sebesar 51,5%, sedangkan Papua merupakan provinsi dengan proporsi kepersertaan wanita terendah yaitu sebesar 47,6%.

Kepesertaan JKN non-PBI wanita secara rata-rata nasional pada periode ini hampir setara dengan pria yaitu sebesar 49,9%. Daerah dengan proporsi kepesertaan wanita sama dengan dan di atas rata-rata nasional sebanyak 17 provinsi, sedangkan 17 provinsi lainnya masih di bawah rata-rata nasional. Gorontalo merupakan provinsi dengan proporsi kepesertaan wanita tertinggi yaitu sebesar 51,8%, sedangkan Maluku Utara merupakan provinsi dengan proporsi kepesertaan wanita terendah yaitu sebesar 47,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua program JKN PBI dan non-PBI sudah relatif setara antara wanita dan pria dengan perbedaan yang kecil di bawah satu persen. Namun, kedua program masih sedikit didominasi oleh pria, di mana JKN Non PBI relatif lebih setara dibandingkan dengan JKN PBI.

No. ISSN 2808-2060

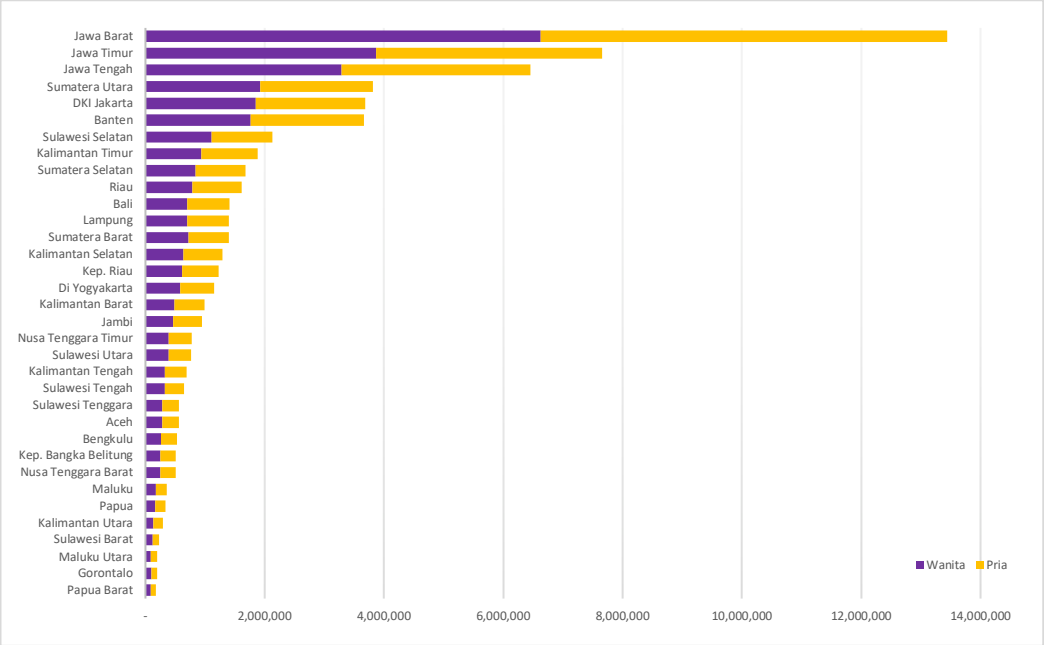

Gambar 6. Peserta Jaminan Kesehatan Non PBI
Sumber: Susenas, 2021, diolah

Di sisi lain, wanita yang menggunakan internet secara rata-rata nasional yaitu sebesar 47,5%. Gorontalo merupakan provinsi dengan pengguna internet oleh wanita tertinggi, yaitu sebesar 50,8% sekaligus menjadi satu-satunya provinsi dengan wanita yang paling dominan menggunakan internet. Sedangkan Papua merupakan provinsi dengan penggunaan internet oleh wanita terendah yaitu sebesar 47,2%.

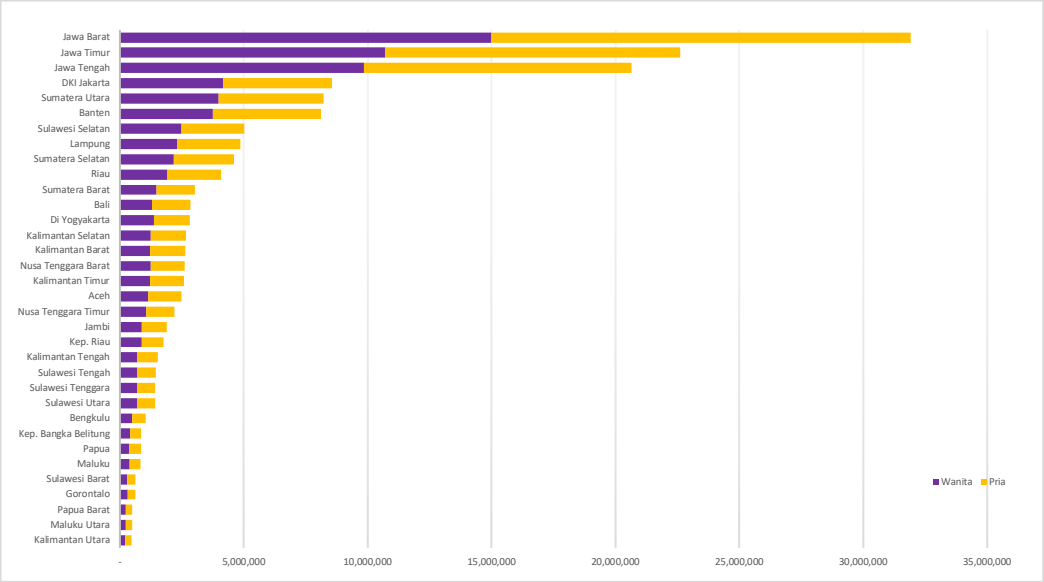

Gambar 7. Penduduk Menggunakan Internet
Sumber: Susenas, 2021, diolah

No. ISSN 2808-2060

Parameter lainnya, wanita yang memiliki tabungan secara rata-rata nasional yaitu sebesar 47,8%. Gorontalo merupakan Provinsi dengan wanita yang memiliki tabungan tertinggi, yaitu sebesar 54,8%, sedangkan Banten dan Papua merupakan Provinsi dengan wanita yang memiliki tabungan terendah yaitu sebesar 41,5%. Angka rata-rata nasional kepemilikan tabungan oleh wanita jauh di bawah pria selisih 2,2%, menunjukkan bahwa kepemilikan tabungan nasional timpang masih didominasi oleh pria.

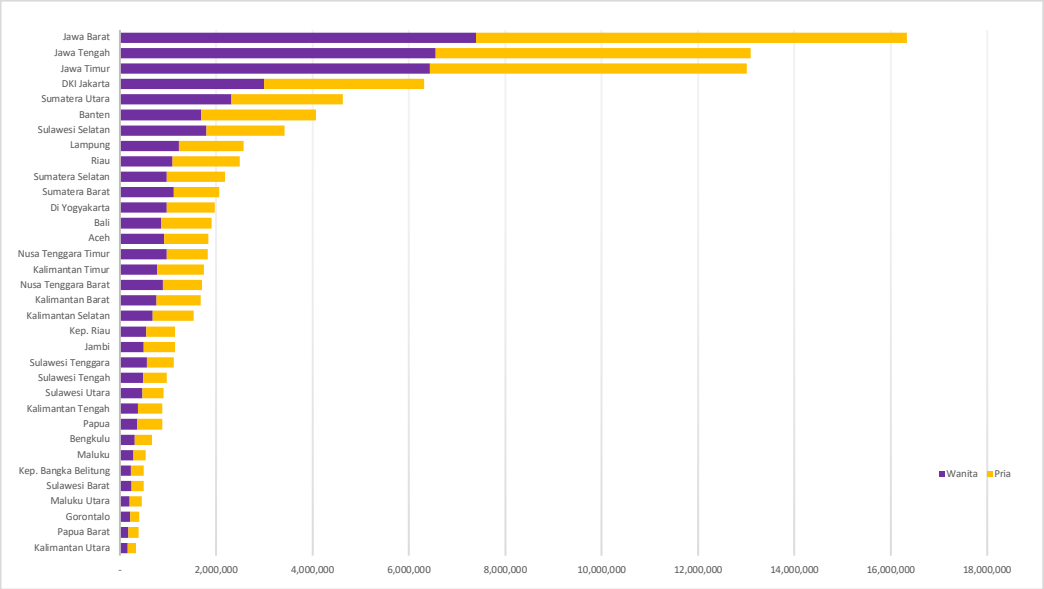

Gambar 8. Penduduk Memiliki Rekening Tabungan
Sumber: Susenas, 2021, diolah

Selanjutnya terkait dengan kasus pelecehan seksual, mayoritas korban secara rata-rata Nasional adalah wanita yaitu sebesar 66%. Terdapat 16 Provinsi yang 100% korbannya adalah wanita, dengan provinsi terbesar korban pelecehan seksual adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Angka korban pelecehan seksual terhadap wanita yang tinggi mengindikasi rentannya wanita dalam kehidupan bermasyarakat.

No. ISSN 2808-2060

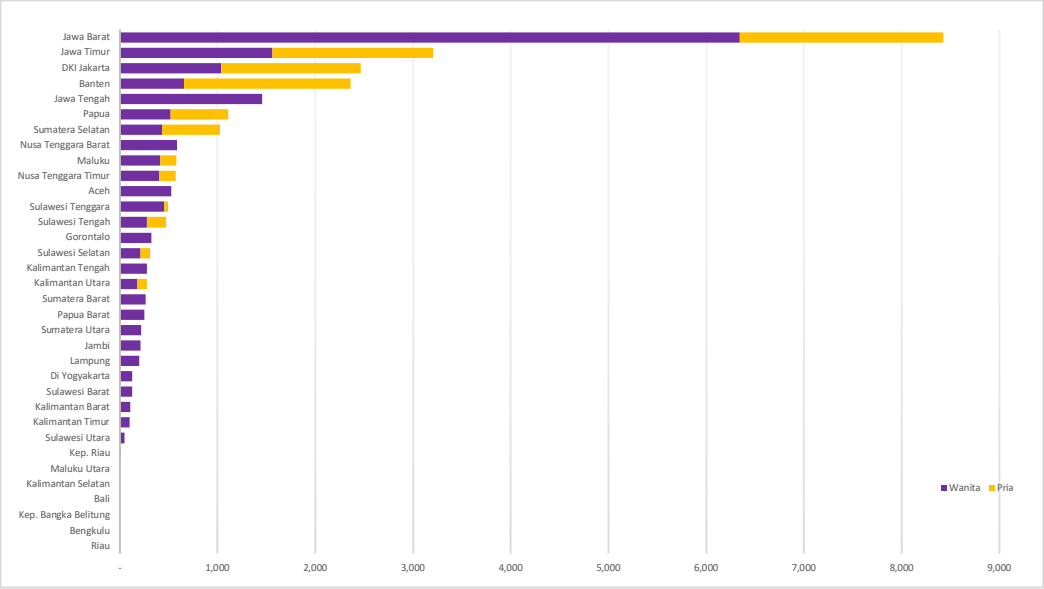

Gambar 9. Penduduk Pernah Menjadi Korban Pelecehan Seksual
Sumber: Susenas, 2021, diolah

Berdasarkan IKG dan berbagai indikator pembangunan di atas, terlihat bahwa proses pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di Indonesia cukup baik dalam mengakomodasi kesetaraan gender antar tahun, meskipun masih ada beberapa indikator yang didominasi oleh pria. Akan tetapi, ruang untuk perbaikan kesetaraan masih dapat terus dilakukan, utamanya juga untuk mengurangi disparitas kesetaraan peran wanita antarwilayah di Indonesia.

Referensi:

BPS, 2022. Kajian Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2022.

ISSN 2808-2060